

PEMBANGUNAN PERTANIAN WILAYAH KEPULAUAN DI MALUKU : KEBIJAKAN, STRATEGI DAN IMPLEMENTASI

J. R. Kermitte
Universitas Pattimura Ambon

PENDAHULUAN

Mencermati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dimana pemerintah telah berketetapan menekan angka kemiskinan 16,6% menjadi 8,2 %, pengangguran 9,5% menjadi 5,1% dan pertumbuhan ekonomi 5,1% menjadi 7,6% pada tahun 2009. Di awal tahun 2005 telah dicanangkan program Revitalisasi Pertanian dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, meningkatkan daya saing produk pertanian dan menjaga kelestarian sumberdaya alam.

Masalah yang dihadapi dalam pembangunan pertanian di Indonesia dewasa ini adalah masalah bunga bank, hutang, bencana alam, globalisasi perdagangan, alih guna lahan, pemanasan global dan sistem pertanian. Selain itu ada beberapa komoditas pangan utama yang belum tercukupi sebagai contoh produksi beras dalam negeri selama empat tahun terakhir sebesar 30,48 – 31,20 juta ton sedangkan kebutuhan beras berkisar antara 32,77 – 33,6 juta ton dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah harus mengimport beras sebesar 2 juta ton/tahun. Selain itu jagung masih diimport sejak tahun 2003 sebesar 1,4 juta ton/tahun, gandum 4,5 juta ton/tahun.

Di Provinsi Maluku kebutuhan komoditas pangan utama beras belum terpenuhi, daerah-daerah penghasil beras seperti daerah transmigrasi Waeyapo (P. Buru), Gemba, Pasahari, Benggoi (P. Seram) belum mampu menyediakan beras untuk kebutuhan daerah sehingga beras harus didatangkan dari luar daerah Maluku. Hal yang sama juga berlaku untuk komoditas kedele. Ditinjau dari segi pola konsumsi, program diversifikasi pangan dapat mengatasi ketergantungan pada pangan utama beras karena masyarakat dapat mengkonsumsi jenis pangan lain seperti ubi-ubian, jagung, sukun dan sagu.

Oleh karena itu dalam melaksanakan pembangunan pertanian di wilayah kepulauan dapat dikembangkan komoditas penghasil karbohidrat non beras (ubi-ubian, jagung, sukun dan sagu.) sesuai kelayakan wilayah secara geografis, kesesuaian lahan serta kelestarian lingkungan.

Pembangunan pertanian wilayah kepulauan (Maluku) dapat dilaksanakan melalui program revitalisasi, pengembangan usaha dan pemeliharaan dengan tujuan menciptakan dan meningkatkan kesinambungan usaha dibidang pertanian dalam arti yang luas serta menjaga agroekosistem atau kelestarian ekosistem pulau.

KONSEP PEMBANGUNAN PERTANIAN WILAYAH KEPULAUAN

Pembangunan pertanian dewasa ini berhubungan erat dengan pengembangan dan sistem manajemen produksi tanaman yang berkelanjutan baik secara ekonomis maupun secara ekologis. Pengembangan teknologi produksi dengan pendekatan konvensional (top – down) sebagaimana yang dilakukan selama ini tidak dapat diandalkan dalam program peningkatan hasil. Salah satu konsep yang diajukan pakar agronomi sebagai respons terhadap pembangunan pertanian dewasa ini khusus ketahanan pangan adalah penataan kembali sistem pertanian menuju sistem *Precision Agriculture* atau Sistem Pertanian Spesifik Lokasi/ Wilayah (Sitompul, 2005).

Maluku sebagai Provinsi Kepulauan terdiri dari 812 pulau (termasuk Maluku Utara) yang sebagian besar tergolong pulau kecil. Pulau yang agak besar adalah pulau Seram, Buru dan Yamdena. Secara ekologi pembangunan di pulau kecil lebih diprioritaskan pada pencegahan kerusakan ekosistem pulau. Aktivitas manusia ditujukan untuk memodifikasi lingkungan untuk meningkatkan penyediaan barang dan jasa. (Macelli, 1990). Pulau kecil dengan sumberdaya terbatas, manajemen lingkungan merupakan syarat utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Menurut FAO (2004) wilayah kepulauan kecil selalu berciri jumlah penduduk sedikit, masa daratan kecil, dikelilingi oleh laut terbuka kesamudera sehingga memiliki kontribusi terhadap kerentanan.

Ditinjau dari segi pengelolaan, pengelolaan pulau-pulau kecil dengan luas kurang lebih atau sama dengan 2000 km² hanya dapat digunakan untuk konservasi, pariwisata, pertanian organik dan peternakan skala rumah tangga dan industri teknologi nonekstraktif (Anonim, 2001).

Ada tiga azas penting yang merupakan landasan pokok dalam mempertimbangkan konsep pertanian kepulauan yaitu :

1. **Azas wawasan lingkungan:** setiap pembangunan yang dilaksanakan disuatu wilayah perlu memperhatikan kondisi alam wilayah agar pembangunan dapat berlangsung dan sukses disamping kondisi lingkungan terpelihara.
2. **Azas pendekatan wilayah:** setiap pembangunan membutuhkan pertimbangan kelayakan geografis meliputi (a). Luas areal yang tersedia untuk kegiatan tertentu. (b). Letaknya dalam wilayah menentukan aksesibilitas, (c). Pola sebaran menentukan kemudahan dalam menggabungkan semua kegiatan pembangunan menjadi satu kesatuan pengelolaan.
3. **Azas keterpaduan:** pembangunan pertanian yang dilakukan diwilayah kepulauan dengan wilayah darat yang sempit harus berpegang pada prinsip keterpaduan (keterpaduan wilayah darat dan laut, keterpaduan leading sector dengan sektor penunjang)

Bertolak dari penjelasan di atas Pertanian Kepulauan dapat didefinisikan sebagai Suatu pola pertanian pada suatu pulau atau wilayah kepulauan yang disesuaikan dengan kelayakan lingkungan secara umum, kelayakan wilayah secara geografis dan kesesuaian lahan yang dapat menjamin peningkatan dan kesinambungan usaha serta kelestarian lingkungan darat maupun lingkungan laut (Nanere, 1992).

Jadi pembangunan pertanian wilayah kepulauan dimaksud adalah rekonstruksi, pengembangan dan pemeliharaan pola pertanian sesuai kelayakan wilayah, kesesuaian lahan, kesinambungan usaha serta kelestarian ekosistem.

PELUANG DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN PERTANIAN WILAYAH KEPULAUAN

Pengaruh faktor eksternal yang perlu diperhitungkan adalah peluang dan tantangan yang dapat dimanfaatkan sehingga pembangunan yang dilaksanakan tidak akan kehilangan momentum. Dihak lain pengaruh faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dapat dikemukakan sebagai kondisi riil yang ada diwilayah kepulauan.

Faktor Internal

A. Kekuatan

1. Diwilayah kepulauan atau pulau-pulau kecil banyak tersimpan sumberdaya genetik/material genetik yang dapat digunakan dalam program rekayasa genetik atau bioteknologi tanaman..
2. Pada wilayah kepulauan juga terdapat terumbu karang dengan pesisir yang panjang, bahan-bahan mineral dan sumber minyak merupakan sumberdaya alam potensial.
3. Pemberlakuan otonomi daerah (UU. No. 32 Tahun 2004).
4. Kondisi keamanan dan ketertiban di Maluku yang semakin kondusif
5. Masyarakat kepulauan adalah masyarakat yang kegiatan sehari-harinya adalah bertani sedangkan untuk desa-desa pesisir bertani dan nelayan

B. Kelemahan

1. Pola pembangunan pertanian yang dilaksanakan diwilayah kepulauan di Maluku umumnya mengikuti pola pembangunan pertanian daerah kontinental atau pulau besar seperti di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.
2. Pengetahuan masyarakat dan aparat pelaksana tentang sistem pengelolaan pembangunan pertanian wilayah kepulauan berbasis kelestarian ekosistem pulau masih rendah.

Faktor Eksternal

A. Peluang

1. Adanya pemekaran wilayah menjadi kabupaten baru di Provinsi Maluku sebagai upaya percepatan pembangunan akan terjadi interaksi secara sinergis untuk pembangunan Maluku secara keseluruhan.
2. Adanya Inpres RI No. 7 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia termasuk daerah Maluku yang pelaksanaannya melalui Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia.
3. Realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009 melalui Program Revitalisasi Pertanian
4. Rekonstruksi sistem pertanian yang ada menjadi Sistem Pertanian Spesifik Lokasi/Wilayah merupakan pilihan terbaik dalam merealisasikan Program Ketahanan Pangan

5. Pulau-pulau kecil dan wilayah perairannya yang dikuasai/dimiliki/diusahakan oleh masyarakat hukum adat, maka kegiatan pengelolaan sepenuhnya berada ditangan masyarakat hukum adat itu sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Tantangan

1. Di Maluku luas daratan hanya 7,6% dari total luas wilayah. dan dari luasan tersebut 14,6% adalah tanaman pangan termasuk areal sagu, tanaman campuran 24,6%, tanaman tahunan 26,6% dan hutan 34,2%
2. Bertiupnya angin musim (angin Timur dan angin Barat) disertai ombak dan gelombang kencang, dipihak lain jarak antara satu pulau dengan pulau lainnya relatif jauh. Kondisi ini menyebabkan terhambatnya transportasi antar pulau serta distribusi barang dan jasa.
3. Kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak yang telah mempengaruhi berbagai aspek perekonomian masyarakat disertai bunga Bank untuk petani tinggi mengakibatkan tingkat penerimaan petani rendah.

KEBIJAKAN STRATEGIS

Pembangunan pertanian wilayah kepulauan akan mengalami berbagai tantangan dalam berbagai dimensi strategis baik secara Lokal, Nasional, Regional dan Global

Lingkungan Makro Strategis

1. **Dimensi Lokal.** Konflik sosial yang terjadi di Maluku belum dapat dikatakan telah pulih normal seperti sebelumnya. Pilkada yang baru saja dilaksanakan telah menimbulkan tanggapan pro dan kontra dalam masyarakat, terjadi saling curiga antar kelompok masyarakat terhadap hal-hal baru/gagasan baru yang dikemukakan yang selanjutnya dapat mengakibatkan aktivitas masyarakat terbatas. Kawasan pulau yang pertumbuhan ekonominya lambat akan menimbulkan kesenjangan yang berdampak negatif dikemudian hari.
2. **Dimensi Nasional.** Pemberlakuan UU No. 32 dan UU No.33 Tahun 2004 sebagai landasan otonomi daerah, dalam implementasinya dapat menyebabkan disharmonisasi antara kabupaten baru dan kabupaten induk yang selanjutnya dapat menghambat koordinasi pelaksanaan tugas pokok pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. **Dimensi Regional.** Liberalisasi perdagangan (AFTA, 2003), era globalisasi (APEC, 2010) dan era kompetisi bebas (WTO, 2020) akan terjadi mobilitas barang dan jasa yang cukup besar, disisi lain masyarakat belum siap untuk menerima kondisi tersebut.
4. **Dimensi Global.** Di waktu mendatang akan terjadi pergeseran menuju kawasan Pasifik dan letak provinsi Maluku yang berada pada tepian kawasan Pasifik tidak akan terhindar dari dampak perubahan tersebut. Hal ini merupakan peluang dimana masyarakat harus disiapkan secara komprehensif dan menyeluruh dalam semua aspek tatanan pembangunan.

Kebijakan Strategis

Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan perlu dirumuskan kebijakan pendekatan pembangunan yang komprehensif yang ditopang oleh pelaksanaan otonomi daerah.

A. Strategi Umum

1. **Strategi Pendekatan Kewilayahan.** Pembangunan pertanian di Maluku harus dilaksanakan dengan pendekatan kewilayahan secara integratif, terstruktur, mendasar dan komprehensif. Hal ini disebabkan karena terdapat tingkat heterogenitas tinggi dalam berbagai aspek. Selanjutnya untuk menghindari arogansi sektoral yang dalam pelaksanaan pembangunan tidak terintegrasi sedangkan yang diharapkan adalah terciptanya kondisi sinergis antara semua komponen. Perlu adanya sentra komoditas strategis yang akan menghasilkan komoditas strategis bila ditinjau dari segi kebutuhan dasar manusia maupun orientasi pasar yang menampilkan keunggulan kompetitif.
2. **Strategi Prioritas.** Strategi ini didasarkan pada kondisi objektif wilayah dan potensi sumberdaya alam lokal yang dimiliki. Strategi ini dikemukakan dalam kerangka pengakuan terhadap berbagai kondisi objektif serta sifat keanekaragaman berbagai aspek dalam masyarakat. Pada strategi ini akan dikaji sektor andalan dan unggulan mana yang membutuhkan penanganan segera namun dalam kapasitas sebagai bagian dari sistem kewilayahan.
3. **Strategi Tiga Kekuatan untuk Pengembangan.** Dalam proses pengembangan diharapkan adanya peran dan optimalisasi dari tiga kekuatan yaitu sektor pendidikan sebagai pusat kajian,

sektor pelaku ekonomi sebagai penggerak dan energi pembangunan dan sektor pemerintah (birokrat) sebagai fasilitator dan dinamisor irama pembangunan

4. **Strategi Berwawasan Lingkungan.** Setiap pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan keserasian dengan lingkungan atau ramah lingkungan. Dengan demikian perlu dikaji dampak pembangunan terhadap lingkungan sebagai langkah penyelamatan.. Kalau daratan dieksploitasi harus diperhitungkan dampaknya terhadap laut.
5. **Strategi Pembangunan dari Laut.** Bertolak dari kondisi perairan yang potensial dibanding dengan daratan maka tumpuan keberhasilan hendaknya dilandasi pada daerah perairan yang luas dan potensial baik didalam laut, dasar laut maupun atas laut. Jadi pembangunan dilaut menjadi prioritas untuk menggerakkan pembangunan didarat. Ini tidak berarti bahwa darat tidak dimanfaatkan namun pemanfaatannya penuh kehati-hatian karena manusia bermukim didarat dan aktivitasnya berdampak pada kelestarian ekosistem laut.

B. Tujuan Strategis

a. Aspek Pemanjapan

1. Meningkatkan keamanan, kedamaian dan kerukunan dalam semua aspek tatanan kehidupan masyarakat
2. Berfungsinya institusi dan nilai budaya lokal yang menumbuhkan semangat kebersamaan dan keterbukaan.
3. Adanya aparatur pemerintahan daerah yang mampu mendorong dan mengarahkan inisiatif dan mengembangkan wawasan masyarakat, mendorong kompetisi sehat dalam masyarakat, sumber produktif yang berdaya guna dan berfungsinya mekanisme pasar dalam mengarahkan prakarsa serta gerak perubahan masyarakat.

b. Aspek Pengembangan

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dalam aspek akademis, keterampilan, profesionalisme serta kemampuan berkompetisi
2. Menumbuhkan dan memperkuat basis ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Penciptaan peluang untuk penanaman infestasi secara efisien dan efektif yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

PROGRAM- PROGRAM UMUM

Untuk merealisasi tujuan dan kebijakan strategis, perlu dikemukakan program-program umum yang akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan pada Rencana Operasional

A. Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum

1. Mengaktifkan dan mengfungsikan struktur adat dan berbagai aspek kehidupan masyarakat agar keamanan lingkungan adat terjaga
2. Melakukan pembinaan mengenai ketertiban dan keamanan sesuai budaya lokal
3. Mengadakan pemantauan wilayah laut yang terbuka yang dapat digunakan kekuatan asing untuk kepentingan infiltrasi atau pencurian kekayaan laut yang merugikan masyarakat

B. Bidang Pendidikan

1. Mendirikan sekolah bermutu khusus untuk siswa-siswa yang berprestasi tinggi
2. Mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan menjadi sekolah unggul
3. Mendirikan dan mengembangkan Program Profesional (Politeknik, Program Diploma dibidang pertanian), Balai Latihan Kerja untuk menyediakan tenaga kerja terampil..
4. Mendirikan dan mengembangkan Perguruan Tinggi bidang Ilmu-Ilmu Pertanian dan Bidang Langka yang dibutuhkan pasar kerja dalam upaya memberdayakan potensi wilayah kepulauan.

C. Bidang Ekonomi

1. Menata sistem agribisnis meliputi agribisnis hulu, hilir dan on farm, sistem pendistribusian yang terintegrasi dan berkelanjutan, kualitas dan kuantitas hasil serta harga komoditas yang merupakan kebutuhan pokok.

2. Menciptakan kebijakan ekonomi yang bertumpu pada sumberdaya alam laut
3. Membangun sentra ekonomi dengan memperhatikan keunggulan kompetitif dari setiap wilayah kepulauan atau wilayah pengembangan berdasarkan analisis sektor andalan dan sektor unggulan.
4. Melibatkan peranan lembaga keuangan daerah dalam memberikan kredit murah kepada masyarakat/petani dalam mempertahankan kelanjutan usahanya.

D. Bidang Transportasi dan Komunikasi

1. Pengadaan dan peningkatan sara dan prasarana transportasi dan komunikasi antar pulau dalam wilayah kepulauan maupun antar desa pegunungan dan desa pantai
2. Menciptakan model transportasi yang menopang pengembangan ekonomi kerakyatan wilayah kepulauan dan sebagai kelanjutan dari sistem transportasi lokal yang terintegrasi.

E. Bidang Pembangunan Pertanian

1. Peningkatan kemampuan petani untuk berusaha serta penguatan lembaga pendukungnya
2. Pengamanan ketahanan pangan melalui program diversifikasi
3. Peningkatan produktivitas, daya saing dan nilai tambah produksi pertanian dan perikanan
4. Pengembangan sentra produksi tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, tanaman perkebunan dan ternak
5. Penerapan teknologi budidaya tanaman sesuai keragaman fisiografi lahan disertai tindakan-tindakan pengendalian untuk menjaga kelestarian sumberdaya lahan.
6. Membangun sistem pertanian organik dengan menggunakan sebanyak mungkin sumber yang terbarui

F. Sistem Pertanian Spesifik Lokasi di Maluku

Komoditas	Lokasi Pengembangan	Komoditas	Lokasi pengembangan
Pangan Beras dan Non Beras		Kacang-kacangan	
a. Padi Sawah	Waeyapo (P.Buru); Kairatu (P.Seram) Pasahari (P.Seram); Banggoi (P.Seram)	a. Kedele	Waeyapo; Kairatu Pasahari; Banggoi
b. Padi gogo	P. Buru; P.Yamdena	b. Kacang tanah	P.Yamdena; P.Seram; P. Buru
c. Talas	Kec. Seram Barat; P. Saparua P. Haruku	c. Kacang hijau	Kec. Taniwel; Wahai P.Yamdena; P.P.Selatan Daya
d. Ubi kayu	P.P.Kai; P. Seram P. Saparua, Haruku; P. Buru	d. Kacang Merah	Kec. Taniwel; P. Yamdena P.P.Selatan Daya
e. Ubi jalar	Kec.Seram Barat; Kec.Seram Utara Kec.Seram Sel & Timur; P.Buru	Buahan	
f. Ubi	Kec.Seram Barat; Kec. Kairatu P.Saparua; P.Haruku; PP.Selatan Daya	a. Gandaria	P. Ambon
g. Sukun	P.Ambon; PP.Lease; PP.Selatan Daya	b. Durian Soya	P. Ambon
		c. Durian biasa	Kec. Taniwel; Kec. Piru; Kec.Kairatu; P.P.Lease; P.Ambon
4. Sayuran		d. Mangga	P.Ambon; P.P.Kai; Kec.Seram Barat PP Selatan Daya; Kec.Seram Selatan
a. Petsai	Kec. Kairatu & Taniwel	e. Jeruk Manis	PP.Teon, Nila, Serua; P.Kisar
b. Kubis	Kec. Kairatu & Taniwel	5. Tanaman Perkebunan	
c. Wortel	Kec. Kairatu & Taniwel	a. Pala Banda	Kec.Banda; PP.Ambon, Lease; P.Seram
d. Apel	Kec.Kairatu & Taniwel	b. Pala Gorong	Kec.Seram Timur
		c. Cengkeh	P. Ambon; PP.Lease, P.Seram
		d. Kakao	P.Buru P.Seram
		e. Kelapa	e Kelapa

PENUTUP

Sebagai wilayah kepulauan dapat dikatakan bahwa Maluku memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dibidang pertanian. Apabila pembangunan pertanian yang dilaksanakan didasarkan pada keunggulan tersebut, diharapkan perekonomian yang dibangun akan memiliki daya saing dan daya guna bagi pembangunan daerah Maluku maupun pembangunan nasional.

Selanjutnya dalam menghadapi tantangan pembangunan pertanian di Indonesia khusus di Maluku saat ini dan saat mendatang Pertanian janganlah dipandang sebagai penyedia pangan dan bahan baku semata tetapi "**pertanian adalah bisnis besar**" yang dijalankan oleh berjuta-juta pengusaha kecil melalui berbagai kendala disertai keterbatasannya. Sekian dan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim , 2001. Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang Berkelanjutan Berbasis Masyarakat. Departemen Kelautan dan Perikanan. Dirjen. Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Jakarta.
- Macelli, A., 1990. Sustainable Development Environmental Management. The case of the Small Mediterranean Island of Gozo. In Sustainable Development Environmental of Small Islands (Editor W.Beller, P.d' Ayala and P. Hein).
- Nanere, J.L., 1992. Pola Pertanian Masa Depan di Maluku. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Pertanian. Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Ambon.
- Sitompul, S.M., 2005. Penataan Sistem Pertanian dengan pendekatan Precision Agriculture sebagai Landasan Program Ketahanan Pangan dalam Revitalisasi Pertanian. Pusat Kajian ESPA. Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang